

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 75/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN  
UMUM PEMBESARAN UDANG WINDU DAN UDANG  
VANAME DI KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**FIRDAUS**

**NIM. 11427103777**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1441 H/2020 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 75/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN  
UMUM PEMBESARAN UDANG WINDU DAN UDANG  
VANAME DI KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

**FIRDAUS**

**NIM. 11427103777**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU-PEKANBARU**

**1441 H/2020 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PERSETUJUAN

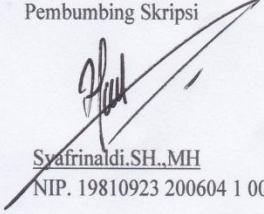
Skripsi dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:75/permen-kp/2016 tentang Pedoman Umum Pemberasaran Udang Windu dan Udang Vaname di Kabupaten Bengkalis, yang ditulis oleh :

Nama : Firdaus  
Nim : 11427103777  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan distujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 24 Desember 2019

Pembimbing Skripsi



Syafrinaldi.SH.,MH  
NIP. 19810923 200604 1 004



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 75/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBESARAN UDANG WINDU DAN UDANG VANAME DI KABUPATEN BENGKALIS”, yang ditulis oleh:

Nama : FIRDAUS  
NIM : 11427103777  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 06 Januari 2020  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2020 M  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Sekretaris  
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji I  
Joni Alizon, SH., MH

Penguji II  
Dr. H. Abu Samah, MH



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIDN 19580712 198603 1 005



## ABSTRAK

Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai, yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan (akuakultur). Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, seperti udang. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:75/permen-kp/2016 tentang Pedoman Umum Pemberasan Udang Windu dan Udang Vaname. Dalam upaya mewujudkan pengelola sumber daya perikanan secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestariannya, dan sumber daya perikanan melalui penangkapan udang menjadi peningkatan produksi budidaya.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ada dua, yaitu bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:75/permen-kp/2016 tentang Pedoman Umum Pemberasan Udang Windu dan Udang Vaname di Kabupaten Bengkalis. Dan apa faktor penghambat Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:75/permen-kp/2016 tentang Pedoman Umum Pemberasan Udang Windu dan Udang Vaname di Kabupaten Bengkalis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilakukan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Apabila ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian diskriptif. Sosiologis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Penelitian ini dilakukan di dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkalis. Dan pengusaha tambak udang di Kabupaten Bengkalis

Hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:75/permen-kp/2016 tentang Pedoman Umum Pemberasan Udang Windu dan Udang Vaname di Kabupaten Bengkalis belum efektif, sehingga jika diukur dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:75/permen-kp/2016 tentang Pedoman Umum Pemberasan Udang Windu dan Udang Vaname maka terdapat adanya kesenjangan antara dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkalis dengan pengusaha tambak udang untuk mendapatkan proses Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:75/permen-kp/2016 tentang Pedoman Umum Pemberasan Udang Windu dan Udang Vaname secara efektif. Faktor penghambat Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:75/permen-kp/2016 tentang Pedoman Umum Pemberasan Udang Windu dan Udang Vaname di Kabupaten Bengkalis yakni masih banyak pengusaha tambak udang yang kurang mengetahui mengenai permen Nomor 75 tahun 2016 ini, tidak pernah dilakukan sosialisasi sehingga banyak pengusaha yang tidak memiliki izin budidaya perikanan dan kurangnya Efektivitas peranan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis.

**Kata Kunci : Perikanan, Budidaya, Tambak**



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, berkat limpah dan rahmat taufiq, inayah, dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan kemampuan penulis. Rasa syukur itu semakin bertambah dalam diri penulis ketika skripsi ini dimunaqasahkan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:75/permen-kp/2016 tentang Pedoman Umum Pemberasan Udang Windu dan Udang Vaname di Kabupaten Bengkalis”** melengkapi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Ilmu Hukum prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA)

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menghadapi rintangan dan hambatan. Namun, Alhamdulillah berkat bimbingan dari Bapak Syafrinaldi SH MH sebagai pembimbing tersebut dapat diatasi. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Teristimewa untuk Ayahanda Almarhum Ibrahim dan Ibunda tercinta Nurjanah, saudara- saudaraku tersayang Afrita ariani, Dedek irawan, Rahmawati, Reka Wahyuni, Mukhlis dan Fitri handayani serta seluruh keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik moril

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun materi untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA)

2. Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Pembantu Dekan, Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta seluruh civitas akademiaka Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau(UIN SUSKA) yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.

3. Ucapan terimakasih Kepada Bapak syafrinaldi. SH., MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.

4. Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc,Ak selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat.

5. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

6. Ucapan terima kasih kepada Bapak Sofyan, S.Pi kelala bidang pelayanan usaha Perikanan dengan setaf seksi perizinan Paulina, S.pi,M.Si Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis serta sub bidanag budidaya perikanan Susi Fenyanti,S.Pi yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis untuk mendukung penyelesaian skripsi ini.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Ucapan terima kasih kepada bapak-bapak Pelaku Usaha Tambak Udang yang telah member keterangan dan informasi kepada penulis untuk mendukung penyelesaian skripsi ini.

8. Kepada semua sahabat-sahabat Ilmu Hukum angkatan 2014 dan kakak-kakak senior yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan, baik dari segi penulisan dan penyusunannya. Oleh karena itu, penulis masih menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Di samping itu, penulis juga berharap semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 22 September 2019  
Penulis

Firdaus

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batas Masalah .....	9
C. Rumus Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Profil Bengkalis .....	16
1. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis .....	16
2. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis .....	20
3. Sosial budaya .....	22
B. Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis .....	22
1. Visi .....	22
2. Misi .....	22
3. Struktur orientasi perangkat Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkalis .....	24
4. Uraian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Bengkalis .....	25
<b>BAB III TINJAUAN TEORI</b>	
A. Hukum .....	30
B. Pelaksanaan .....	32
C. Peraturan Menteri .....	35

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pengertian perikanan .....	39
E. Asas-asas pengelolaan perikanan .....	40
F. Tambak.....	42
G. Pedoman Pembesaran Udang .....	44
H. Dasar Hukum Pelaksanaan Budidaya Tambak Udang.....	46

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:75/Permen-KP/2016 Tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu Dan Udang Vaname (Studi di Kabupaten Bengkalis Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan) .....	47
B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:75/Permen-KP/2016 Tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu Dan Udang Vaname .....	53

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	66

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau	Tabel 1.1	Izin Usaha Udang Vaname Di Kabupaten Bengkalis (Kecamatan Bengkalis Dan Kecamatan Bantan).....	8
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang	Tabel 1.2	Unit Tambak Udang Vaname Di Kabupaten Bengkalis (Kecamatan Bengkalis Dan Kecamatan Bantan).....	8
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:	Tabel 1.3	Populasi dan sampel .....	11
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	Tabel 4.1	Keberadaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:75/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu Dan Udang Vaname .....	49
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	Tabel 4.2	Mendaftar Sebagai Pembudidaya Tambak Udang .....	51
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	Tabel 4.3	Prosedur Pendaftaran Tambak Udang .....	53
	Tabel 4.4	Izin Usaha Tambak Udang Vaname .....	56
	Tabel 4.5	Terdaftar Pengusaha Tambak Udangh Di Kabupaten Bengkalis .....	57
	Tabel 4.6	Hambatan dalam mengurus izin .....	59
	Tabel 4.7	Pengawasan Terhadap Usaha Tambak Udang.....	62





## DAFTAR LAMPIRAN

1. **Hak Cipta Ilmiah UIN Suska Riau**
    - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 
- Lampiran I : Pengesahan Perbaikan Skripsi
  - Lampiran II : Jurnal
  - Lampiran III : Pengesahan perbaikan seminar proposal
  - Lampiran IV : Surat Mohon Izin Riseat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ke Pemerintah Provinsi Riau Dinas Peneneman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - Lampiran V : Surat Rekomendasi Pemerintah Provinsi Riau Dinas Peneneman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
  - Lampiran VI : Surat Rekomendasi Dinas Peneneman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis.
  - Lampiran VII : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konsitusi Undang-undang Dasar 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.<sup>1</sup> Indonesia memiliki falsafah Negara yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu Indonesia menganut sistem Pemerintahan yang sesuai dengan falsafah Negara yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.<sup>2</sup>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah provinsi dan Daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya di dalam ayat (2) menyebutkan “Pemerintah Daerah provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Reformasi Pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan Pemerintahan dari paradigma sentralisasi kearah desentralisasi nyata yang ditandai dengan pemberian otonomi

<sup>1</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2012) h. 1

<sup>2</sup> C. S. T. Kansil, dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 148

yang lebih luas dan nyata pada Daerah. Pemberian ini dimaksudkan khususnya untuk lebih memandirikan Daerah serta pemberdayaan masyarakat (*empowering*)<sup>3</sup>.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (kemudian direvisi pada tahun 2004), yang diimplementasikan sejak tahun 2001, maka beberapa kewenangan keuangan (Daerah) dilaksanakan oleh birokrasi Pemerintah Daerah (Pemda). Mulai saat itu pemda mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan keperluan dan tuntutan masyarakat setempat<sup>4</sup>.

Otonomi Daerah juga dipandang sebagai suatu hak untuk mengatur dan memerintah Daerah sendiri. Hak itu sumbernya adalah delegasi kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah pusat sebagai refleksi komitmen bersama yang harus senantiasa dijadikan sebagai landasan utama pelaksanaan Pemerintahan.<sup>5</sup>

Otonomi Daerah, diharapkan adanya perubahan secara bertahap bagi Daerah, yaitu menuju pada kemandirian Daerah. Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah baik provinsi, maupun kabupaten/kota telah memberikan keleluasan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola potensi Daerah dan melaksanakan pembangunan Daerahnya.

<sup>3</sup>HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, , (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), Ed. 1, Cet. 2, h. 27

<sup>4</sup>Leo Agustini, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 233

<sup>5</sup>Samsul Wahidin, *Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upaya mewujudkan pengelola sumber daya perikanan secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestariannya, perlu ada perubahan orientasi dari eksploitasi sumber daya perikanan melalui penangkapan udang menjadi peningkatan produksi perikanan budidaya.<sup>6</sup>

Potensi sumberdaya perikanan yang dimiliki serta dalam rangka menghadapi tantangan global termasuk di bidang perikanan maka visi pembangunan perikanan budidaya adalah: perikanan budidaya sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi andalan yang diwujudkan melalui sistem budidaya yang berdaya saing, berkelanjutan dan berkeadilan<sup>7</sup>

Perubahan orientasi dari eksploitasi perikanan tangkap menjadi peningkatan produksi perikanan budidaya membawa berbagai konsekuensi diantaranya kesiapan sarana dan prasarana pendukung produksi, teknologi pembudidaya udang, dan dukungan dari pelaku usaha. Namun demikian, pendayagunaan lahan pembudidaya udang windu dan udang vaname juga tetap harus memperhatikan daya dukung yang ada.

Teknologi pembesaran udang windu dan udang vaname telah berkembang cukup pesat mulai dari teknologi sederhana, semi intensif, intensir dan super intense. Perkembangan dan penerapan inovatif dan adaptif di harapkan dapat membantu pelaku usaha terutama pembudidaya udang windu dan udang vaname<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:75/permen-kp/2016 tentang Pedoman Umam Pemberasan Udang Windu (*penaeus monodon*) dan Udang Vaname ( *litopenaeis vanname* ). h.5

<sup>7</sup>M. Fatuchri Sukadi Peningkaan/ Teknologi Budidaya Perikanan, Jumal Iktiologi Indonesia Vol.2, No. 2,T\,2002: 61-66 ISSN 1693 – 0339,h. 61

<sup>8</sup>*Ibid*, 5-6

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai, yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan (akuakultur). Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang. Penyebutan “tambak” ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut. Kolam yang berisi air tawar biasanya disebut kolam saja atau empang.

Tambak udang adalah sebuah kolam yang dibangun untuk membudidayakan udang, baik udang air tawar, air payau, maupun air asin. Udang merupakan salah satu jenis hewan penyaring sehingga kualitas air (keasaman dan kadar garam) sangat menentukan hasil yang didapatkan oleh petambak. Udang yang potensial untuk dibudidayakan dalam tambak adalah udang windu dan udang vaname. Keduanya mampu menoleransi kadar garam antara 0 hingga 45 persen<sup>9</sup>. Penggunaan tambak dapat dilakukan secara bergiliran dengan hewan lain, seperti ikan bandeng sehingga tambak udang dapat berubah menjadi tambak ikan tergantung musim.

Kabupaten Bengkalis merupakan daerah Kepulauan, dimana daerah yang dipergunakan sebagai tempat pembangunan Tambak untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir. Secara umum tambak biasanya dikaitkan langsung dengan pemeliharaan udang vaname, walaupun sebenarnya masih banyak spesies yang dapat dibudidayakan di tambak misalnya ikan bandeng, ikan nila, ikan kerapu, kakap putih dan sebagainya, Tetapi tambak udang lebih dominan digunakan untuk kegiatan budidaya udang vaname di Kabupaten Bengkalis.

---

<sup>9</sup> Achmad Sudradjati Wedjatmiko, *Budi Daya Udang Di Sawah Dan Diambak*, (Penebar Swadaya 2010), h.11

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Udang vaname merupakan produk perikanan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi berorientasi ekspor. Tingginya harga udang vaname cukup menarik perhatian para pengusaha untuk terjun dalam usaha budidaya tambak udang di Kabupaten Bengkalis, untuk harga udang ini tergantung ukuran atau saiz. dari saiz 200 sampai 200 yang di jual dipasaran untuk harga perkilonya mencapai Rp. 20.000 sampai Rp.80.500 per Kg.<sup>10</sup> Para pengusaha di bidang lain yang sebelumnya tidak pernah terjun dalam usaha budidaya tambak udang vaname secara beramai-ramai membuka lahan baru tanpa memperhitungkan aturan-aturan yang berkenaan dengan kelestarian lingkungan sehingga menimbulkan masalah. Masalah yang menonjol adalah terjadinya degradasi lingkungan pesisir akibat dari pengelolaan yang tidak benar, seperti penebangan hutan bakau, Penurunan mutu lingkungan pesisir akibatnya membawa dampak yang sangat serius terhadap lingkungan hutan bakau dan mengakibatkan kerusakan lahan bakau bahkan sudah sampai pada ancaman terhadap abrasi pantai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 75/permen-kp/2016 tentang Pedoman Umam Pemberasan Udang Windu dan Udang Vaname pada bab II tentang lokasi pembudidayaan udang diawali dengan penentuan lokasi

Untuk mendukung kebutuhan biologis udang yang di pelihara. Untuk memenuhi daya mendukung tersebut perlu dilakukan pemilihan lokasi yang tepat.

---

<sup>10</sup> <https://hargabarangterbaru.top/harga-udang/>, di akses pada tanggal 1 April 2019/ Jam 03:00 wib



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pemilihan lokasi dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan suatu lahan untuk konstruksi tambak dan operasional.

3. Mengidentifikasi kemungkinan dampak negatif dari pembangunan lokasi akibat social yang di timbulkan. Dan

4. Dijelaskan lagi pada lokasi pembesaran udang harus memenuhi persyaratan terdapat pada poin 1(satu) harus dijelaskan bahwa; tidak boleh membangun tambak baru pada lahan mangrove dan zona inti kawasan konservasi.<sup>11</sup>

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 22 ayat 1 menyatakan “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”<sup>12</sup> dan Peraturan Pemerintah Nomor 27/2012 tentang Izin Lingkungan. Menurut PP Nomor. 27/1999 dinyatakan bahwa : Penilaian Amdal menjadi syarat mutlak dalam pemberian izin, dengan demikian tidak ada izin usaha sebelum AMDAL dianggap memenuhi syarat karena AMDAL menjadi alat perencanaan program dalam proyek untuk mencapai tujuan pembangunan yang berwawasan Lingkungan.<sup>13</sup>

Adapun yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian ini, yaitu dari hasil pra riset dilapangan diketahui Kabupaten Bengkalis usaha pembudidaya

<sup>11</sup> *Op.cit.*

<sup>12</sup> <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undag-undang/Pages/Undang-Undang-No.32-Tahun-2009-mengenai-Perlindungan-dan-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup.aspx>, di akses pada tanggal 13 September 2016

<sup>13</sup> <http://binpers.com/2018/03/16/hutan-mangrove-di-bengkalis-terancam-punah-disulap-menjadi-tambak-udang/>, di akses pada tanggal 16 maret 2018.

- udang vaname masih marak, ada sebanyak 50 lokasi pembudidaya udang vaname di Kabupaten Bengkalis. Namun dari sekian banyaknya pengusaha pembudidaya udang vaname tersebut, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis hasil riset dilapangan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis ada 38 lokasi tambak udang yang ada di Kabupaten Bengkalis yang telah terdaftar dalam pengurusan rekomendasi teknis dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis. Ketiga puluh delapan lokasi tambak udang tersebut memiliki jumlah unit/petakan tambak udang yang aktif sebanyak 256 yang aktif sedangkan yang pasif sebanyak 23 unit/petakan tambak udang di Kabupaten Bengkalis. Dari 38 lokasi pembudidaya tambak udang yang terdaftar ini belum mempunyai izin budidaya perikanan, hanya 1 orang pengusaha yang sudah memiliki izin budidaya perikanan. dengan jumlah yang sangat banyak ini yang belum mempunyai izin akan menimbulkan dampak terhadap kerusakan hutan bakau, saat ini di perkirakan hutan bakau yang dirusak berubah fungsi menjadi tambak udang kurang lebih ratusan hektar, tersebut disejumlah wilayah desa pulau Bengkalis terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1**  
**Izin Usaha Udang Vaname Di Kabupaten Bengkalis**  
**(Kecamatan Bengkalis Dan Kecamatan Bantan)**

Izin	Pengusaha
Berizin	1
Tidak berizin	49
Jumlah	50

Sumber :Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

Berikut jumlah keseluruhan unit tambak udang vaname aktif dan pasif di Kabupaten Bengkalis

**Tabel 1.2**  
**Unit Tambak Udang Vaname Di Kabupaten Bengkalis**  
**(Kecamatan Bengkalis Dan Kecamatan Bantan)**

No	Status	Unit Tambak
1	Aktif	257
2	Pasif	56
	Jumlah	313

Sumber :Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017

Setelah membandingkan pedoman umum pembesaran udang yang terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 dalam prakteknya belum sesuai, dilihat dari penerapan pelaksanaan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 seperti halnya tidak sangan di tegaskan kepada pengusaha dalam proses budidaya perikanan, terutama proses perizinan. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:“ **Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 75/permen-kp/2016 tentang Pedoman Umam Pemberasan Udang Windu dan Udang Vaname di Kabupaten Bengkalis**”.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## B. Batasan Masalah

Menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu khusus membahas mengenai pembangunan tambak udang di lahan mangrove dan zona inti kawasan konservasi.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 75/permen-kp/2016 tentang Pedoman Umum Pemberasan Udang Windu dan Udang Vaname di Kabupaten Bengkalis?
2. Apa faktor penghambat Efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Pemberasan Udang Windu dan Udang Vaname di Kabupaten Bengkalis?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 75/permen-kp/2016 tentang Pedoman Umum Pemberasan Udang Windu dan Udang Vaname di Kabupaten Bengkalis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Pemberasan Udang Windu dan Udang Vaname di Kabupaten Bengkalis
2. Manfaat Penelitian.
- Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini yaitu antara lain :
- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum lingkungan dan ilmu hukum pada umumnya.
  - c. Sebagai bahan pertimbangan masukan bagi penulis dari hasil penelitian ini dan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi metode peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut.
- E. Metode Penelitian**
- Metode penelitian adalah suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian yang berfungsi untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti<sup>14</sup>. Guna mendukung suksesnya penelitian ini baik dalam rangka memberikan jawaban atas permasalahan yang ada maupun terhadap tercapainya tujuan dan manfaat penelitian, maka peneliti telah menetapkan metode penelitian sebagai berikut:

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Ed. 1, Cet h. 24

## 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hokum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilakukan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*)<sup>15</sup>.

Penelitian ini adalah penelitian *deskriptif*, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjalankan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>16</sup>

## 2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian<sup>17</sup>. Adapun Teknik pengambilan sampel yang dilakukan penulis yaitu teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan tertentu dari peneliti<sup>18</sup>.

**Tabel 1.3**  
**Populasi dan sampel**

No	Sub populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Sub Bidang Peleyanan Usaha perikanan dan bidang budidaya Kabupaten Bengkalis	4	4	100%
2	Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) perikanan	2	2	100%
3	Pengusaha budidaya tambak udang vaname	38	38	100%
Jumlah		44	44	100%

Sumber: Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis

<sup>15</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta, PT Rajawali Pers, 2009), h. 134

<sup>16</sup> Sarifuddin Azwar, *metode penelitian*, (Yogyakarta : pustaka belajar, 1998), h. 7

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, h. 98

<sup>18</sup> Jusuf Soewadji, *pengantar metodologi penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 141



3.

### Sumber Data

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti<sup>19</sup>. adapun data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan ketua dan pegawai dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkalis dan melakukan observasi serta jawaban dari kuisioner yang disebarkan kepada pengusaha tambak udang.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dengan peraturan perundang-undangan<sup>20</sup>.
- c. Data tersier adalah data pendukung untuk menjelaskan data primer dan data sekunder. Seperti kamus hukum Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, h. 106

<sup>20</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

gejala-gejala subjek yang akan diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khususnya diadakan.<sup>21</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian, dalam hal ini ditujukan kepada ketua dan pegawai dinas perikanan Kabupaten Bengkalis dan pengusaha tambak udang di Kabupaten Bengkalis.

### 5. Analisis data

Dalam penelitian ini langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan dan menyusun data serta keterangan yang diperoleh dari instrumen penelitian, kemudian disusun dan diatur, dikelompokkan sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, diteliti menyangkut kejelasannya, konsistennya dan hubungannya dengan pokok masalah lalu ditarik suatu kesimpulan dengan cara deduktif yaitu mencari kesimpulan dari hal-hal umum ke khusus, sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan bukan menggunakan statistik, tetapi penganalisaan suatu permasalahan dengan menggunakan hitungan matematika atau sejenisnya dalam menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

---

<sup>21</sup>Ibid.,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan disajikan dalam penelitian ini terdiri dari bab pertama sampai dengan bab kelima, yang terdiri dari:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Mencakup profil Kabupaten Bengkalis, keadaan geografis dan keadaan penduduk, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis

### BAB III : TINJAUAN TEORI

Dalam bab ini dituangkan mengenai tinjauan tentang teori-teori yang berkenaan dengan unsur penelitian.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dituangkan tentang Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75/permen-  
kp/2016 tentang Pedoman Umum Pemberasan Udang Windu (*penaeus monodon*) dan Udang Vaname (*litopenaeis vannamei*) serta faktor penghambat Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Pemberasan Udang Windu dan Udang Vaname di Kabupaten Bengkalis





## BAB V : PENUTUP

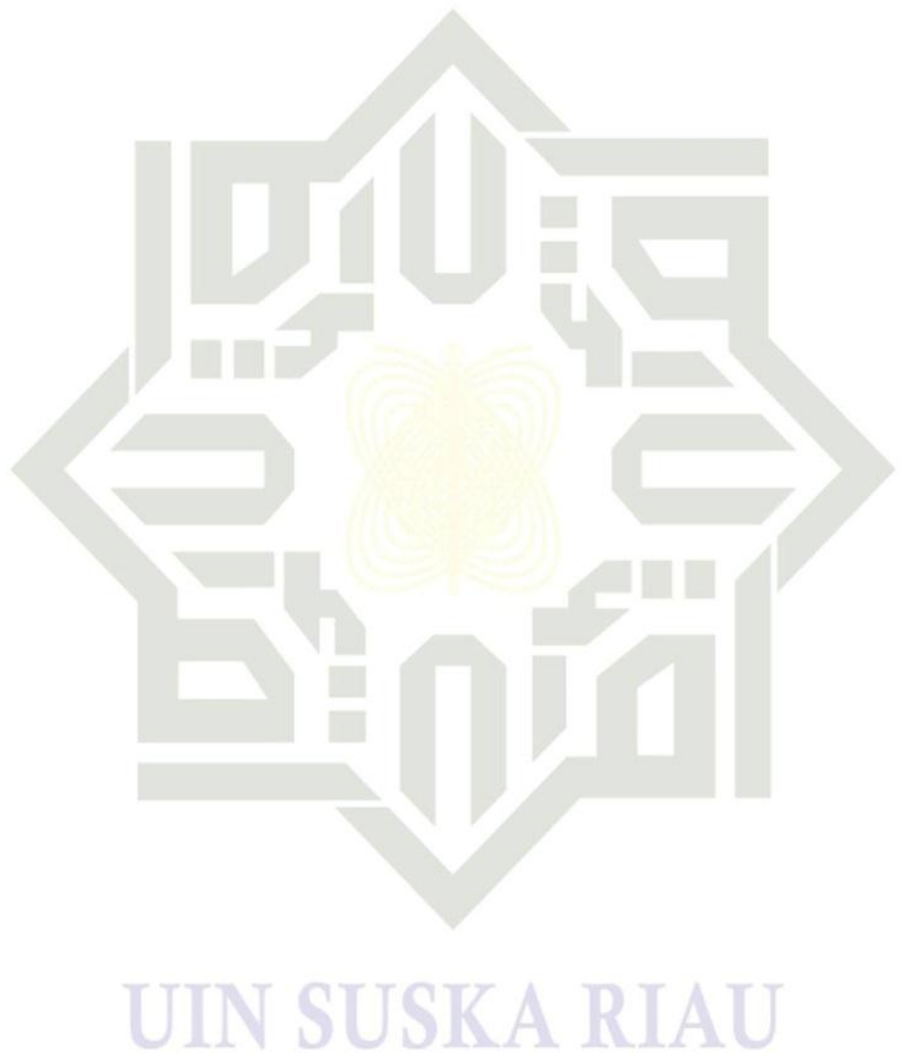
Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diberikan untuk perbaikan dari hasil penelitian di lapangan

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### Profil Bengkalis

##### Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis

Kepulauan Bengkalis merupakan kabupaten dengan julukan negeri junjungan atau kota terubuk. Banyak ragam budaya bisa Anda jumpai di sana, dan masyarakatnya pun tergolong banyak dan terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, Jawa, Batak, Minang dengan kontribusi penduduknya adalah Melayu.<sup>22</sup>

Nama Bengkalis diambil dari Kata " Mengkal" yang berarti sedih atau sebak dan "Kalis" yang berarti tabah, sabar dan tahan ujian kata ini di ambil dari ungkapan raja kecil kepada pembantu dan pengikutnya sewaktu baginda sampai di pulau Bengkalis ketika ingin merebut tahta kerajaan Johor. dengan ungkapan "Mengkal rasanya hati ini karena tidak diakui sebagai Sultan yang memerintah negeri namun tidak mengapalah, kita masih kalis dalam menerima keadaan ini" sehingga menjadi buah bicara penduduk bahwa baginda sedang Mengkal tapi masih Kalis akhirnya ungkapan itu menjadi perkataan " oh baginda sedang Mengkalis" dari kisah ini timbullah kata mengkalis, bahkan berubah menjadi kata Bengkalis.<sup>23</sup>

Sejarah Bengkalis bermula ketika Tuan Bujang alias Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah mendarat di Bengkalis pada tahun 1722. Beliau di sambut oleh batin Senggoro dan beberapa Batin pucuk suku "asli" Batin

<sup>22</sup> <https://monitorriau.com/news/detail/1054/asal-mula-dan-sejarah-munculnya-nama-kabupaten-bengkalis>. Di akses pada hari Sabtu, 03 September 2016 - 21:29:51 WIB  
<sup>23</sup> <http://herwandisahputra.blogspot.com/2014/10/sejarah-berdirinya-nama-kabupaten.html>. Jumat, 24 Oktober 2014

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Merbau, Batin Selat Tebing Tinggi dll. Berita Raja Kecil adalah pewaris kerajaan Johor semakin menumbuhkan rasa hormat Batin-Batin di maksud, sehingga mereka mengusulkan agar Raja Kecil membangunkan kerajaannya di pulau Bengkalis. Bengkalis merupakan Kabupaten dengan julukan Negeri Junjungan, pusat kota terletak di Kecamatan Bengkalis terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, Jawa, Batak, Minang dengan mayoritas penduduknya adalah Melayu.

Kedatangan Raja Kecil beserta pembantu dan pengikutnya disambut oleh Batin Senggoro, Batin Merbau, Batin Selat Tebing Tinggi dll. Raja Kecil adalah pewaris Raja Johor, sehingga membuat batin-batin tersebut lebih hormat dan mereka mengusulkan agar Raja Kecil membangunkan kerajaannya di pulau Bengkalis. Namun melalui musyawarah beliau dengan Datuk Laksemana Bukit Batu, Datuk Pesisir, Datuk Tanah Datar, Datuk Lima Puluh dan Datuk Kampar dan para Batin, di sepakati bahwa pusat kerajaan didirikan di dekat Sabak Aur yakni di sungai Buntan salah satu anak Sungai Siak, pusat kerajaan itu didirikan pada tahun 1723. Kerajaan inilah kemudian berkembang menjadi kerajaan Siak Sri Indra Pura, yang pernah menguasai kawasan yang luas di pesisir pantai Sumatra bagian utara dan tengah sampai ke perbatasan Aceh.

Catatan sejarah menunjukkan, bahwa Bengkalis pernah menjadi basis awal kerajaan Siak. Di Bengkalislah wawasan mendirikan kerajaan Siak di mufakati. Dan di Bengkalis pula bantuan moral dari rakyat di padukan ketika beliau keluar dari Buntan. Sejarah juga mencatat, setelah belanda semakin berkuasa. Maka Bengkalis pula yang menjadi tempat kedudukan residen pesisir timur pulau Sumatra berdasarkan perjanjian dengan Sultan Syarif Kasim Abdul Jalil Syarifudin menyerahkan pulau bengkalis kepada Hindia Belanda tanggal 26 Juli 1823.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejarah juga mencatat sebelum kedatangan Raja Kecil, Bengkalis sudah menunjukkan peran penting dalam arus lalu lintas niaga di selat Melaka. Terutama sebagai persinggahan saudagar yang keluar masuk sungai Siak. Bahkan sejak Tupun (Petapahan) di temui timah (1674) dan emas. peran Bengkalis dalam hubungan Melaka dengan kerajaan di pesisir timur Sumatra semakin besar, terutama dimasa berdirinya kerajaan Gasib. Di masa pemerintahan Sultan Mansur Syah tahun (1459-1477) Gasib di kuasai oleh Melaka, raja Gasib yang belum menganut agama Islam di Islamkan dan di beri gelar Sultan " Ibrahim" dan di jadikan wakil Sultan Melaka di Gasib, sejak itu kerajaan Gasib di bawah kepemimpinan Sultan Ibrahim (Sebelum di Islamkan bernama Megat Kudu) menjadi kawasan pengembangan Islam.<sup>24</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956, ditentukan Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Propinsi Riau.

Provinsi Riau sendiri termasuk salah satu provinsi paling kaya di Indonesia. Hasil kekayaan pertambangan minyak bumi, batu bara, hutan, hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, hasil-hasil laut serta sungai, dan sebagainya. Jumlah kontribusi 59,6 triyun (Salam, Alfitra, 2001; 13). Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi dan menyediakan untuk pemasukan kas negara. Salah satunya, untuk minyak saja Riau menyumbang sekitar 50% produksi nasional. Bahkan, Riau termasuk tiga provinsi terkaya di Indonesia

<sup>24</sup> ibid

- dengan pendapatan 3,7 trilyun, di bawah Jawa Barat (5,2 trilyun), dan Jatim (4,3 trilyun) (Tempo, 9 April 2000). Bengkalis pada masa lalu memegang peranan penting dalam sejarah. Berdasarkan cerita rakyat yang ada, dimulai pada tahun 1445, Bengkalis hanya merupakan Kampung nelayan. Berdasarkan sumber sejarah, pada tahun 1678 daerah ini menjadi tempat pertemuan pedagang-pedagang Melayu, Jawa, Arab yang membawa barang dagangannya bersama dengan pedagang-pedagang dari Palembang, Jambi, Indragiri, Aceh, Kedah, Perak, Kelong, Johor, Penang, Petani, Siam, Kamboja, Kocin, Cina dan orang-orang Minangkabau yang mendiami Sumatera dan datang ke sana untuk mengambil garam, beras, dan juga ikan (terubuk) yang lebih banyak diambil oleh orang-orang Selat.
- Dalam perkembangannya, pada tahun 1717 Bengkalis dijadikan sebagai garis penyerangan terhadap Johor oleh Raja Kecil. Di Bengkalis inilah, Raja Kecil menyusun kekuatan angkatan perang. Selanjutnya, Raja Kecil memulai Kerajaan Buantan yang kemudian disebut Kerajaan Siak pada tahun 1723. Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723-1748). Perbatinan Gasib, Perbatinan Senapelan, Perbatinan Sejahleh, Perbatinan Perawang, Perbatinan Sakai, Perbatinan Petalang, Perbatinan Tebing Tinggi, Perbatinan Merbau, Perbatinan Merbau, Perbatinan Rangsang, Kepenghuluan Siak Kecil, Kepenghuluan Siak Kecil. Saat didirikannya Kerajaan Siak ini Bengkalis dan Bukit Batu dibuat pos terdepan dalam rangka pertahanannya dengan pimpinan Datuk Laksamana Raja Di Laut. Datuk Laksamana Raja Dilaut membuat armada yang kuat membuat kapal perang yang dilengkapi dengan senjata yang didatangkan dari negara-negara Islam.
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis meliputi bagian Pesisir Timur Pulau Sumatera antara 30° Lintang Utara (LU), -0° 17 Lintang Utara atau 100° 52 Bujur Timur (BT), 102° 52 Bujur Timur (BT), -102° Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bengkalis adalah 30.646,83 km<sup>2</sup>, meliputi pulau-pulau (daratan) dan lautan. Kabupaten Bengkalis pusat pemerintahannya dan menjadi ibukotanya adalah Kota Bengkalis dan terletak di Pulau Bengkalis. Wilayah administrasi sebagian besar mencakup wilayah di Pulau Sumatera seperti Duri, Dumai. Jarak antara Duri - Bengkalis 106 kilometer, Dumai-Bengkalis 78 kilometer, kedua wilayah tersebut berada di Pulau Sumatera yang dipilih oleh laut. Sarana transportasi dari Pulau Sumatera ke daerah ini dapat menggunakan kapal penumpang (feri) yaitu dari Dumai, Pakning, dan Pekanbaru. Selain itu masih ada kapal Roro adalah kapal yang bisa mengangkut barang dan kendaraan roda empat. Maksudnya, untuk menuju ke Bengkalis sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis tidak ada masalah, hanya saja jadwalnya masih terbatas karena kapal penumpang atau barang hanya satu sampai dua kali sehari saja.

Dengan demikian para penumpang menunggu kapal sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Wilayah Kabupaten Bengkalis di sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan berbatasan Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau. Daerah Bengkalis ini beriklim tropis dengan jumlah curah hujan antara 773-1734 mm / tahun dengan suhu udara antara 26° -32°C. Musim kemarau di daerah ini pada umumnya terjadi pada bulan

2. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

februari sampai dengan Agustus, sedangkan musim penghujan pada bulan September sampai dengan Januari, dengan jumlah curah hujan tertinggi dalam setahun sekitar 1734 mm / tahun dan jumlah hujan terendah adalah 773 mm / tahun.

Kabupaten Bengkalis, wilayah administrasi sebagian besar berada di Pulau Sumatera, namun ibukotanya berada di Pulau Bengkalis. Sehubungan dengan itu, Kota Bengkalis senantiasa di kunjungi orang-orang dari Pulau Sumatera untuk administrasi pemerintahan (surat-surat izin dan lain sebagainya). Kota Bengkalis sendiri terkenal dengan sebutan Kota Terubuk. Terubuk merupakan jenis ikan yang sangat terkenal pada masa mendatang Datuk Laksamana, sedangkan pada saat ini semakin sulit ditemukan. Harganya yang mahal membuat para pemburu ikan berlomba-lomba mencarinya sangat menentang perkembangan ikan ini. Jarak Kota Bengkalis dengan Kota Propinsi sejauh 173 km. Untuk mencapai ibukota provinsi menggunakan dua jalur transportasi yaitu laut dan darat, dengan jarak tempuh sekitar 6 jam perjalanan. Jalur laut melewati Selat Bengkalis dan terus melewati Sungai Siak. Sementara jalur darat melewati Selat Bengkalis menuju Dumai atau dapat juga melalui Buton atau Pakning dan menggunakan transportasi darat ke Pekanbaru. Bagian ini cukup unik, yaitu bagian tepi pantai pada umumnya lebih tinggi dari bagian tengahnya. Tanah di pinggir pantai terdiri dari tanah liat, sedangkan bagaian tengahnya cukup rendah yang terdiri dari rawa-rawa. Saat musim hujan daerah Bengkalis tergenang udara karena udara mengalir ke bagian tengah. Pulau Bengkalis sering diibaratkan sebuah piring. Pada bagian sisinya lebih tinggi sedangkan bagian tengahnya lebih rendah (bentuk pulau Bengkalis cekung). Pada bagian tengah pulau ini dibangun oleh gambut dengan

ketinggian mencapai 2 meter. Selain itu, hutan rawa yang luas semakin lama semakin berkurang.

### 2. Sosial Budaya

Kota Bengkalis sebagai ibukota Kabupaten Bengkalis merupakan daerah yang baru berkembang. Namun demikian, sejarah Bengkalis tidak pernah memegang peranan penting dalam sejarah. Sehubungan dengan itu, di Kota Bengkalis ini banyak ditemukan bangunan-bangunan bersejarah dan rumah-rumah tua. Dalam perkembangannya Kota Bengkalis dihuni oleh berbagai suku bangsa Melayu, Cina, Jawa, Minang, dan Batak disamping suku bangsa lainnya yang merupakan penduduk asli. Masyarakat Melayu Bengkalis beragama Islam dan identik dengan budaya Islam dalam kesehariannya. Upacara-upacara tradisionalnya sesuai dengan tradisi Islam dan juga nilai-nilai kehidupan bernuansa Islami. Sehubungan dengan itu dalam falsafah Melayu mengklaim bahwa "Melayu adalah Islam, mendukung tidak Islam berarti tidak Melayu".<sup>25</sup>

## B. Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis

### 1. Visi

Terwujudnya Pengelolaan Sumber daya Kelautan dan Perikanan

Secara Profesional Menuju Masyarakat yang Sejahtera.

### 2. Misi

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan;

<sup>25</sup> <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/sejarah-bengkalis>. Di akses pada 10 Februari 2015



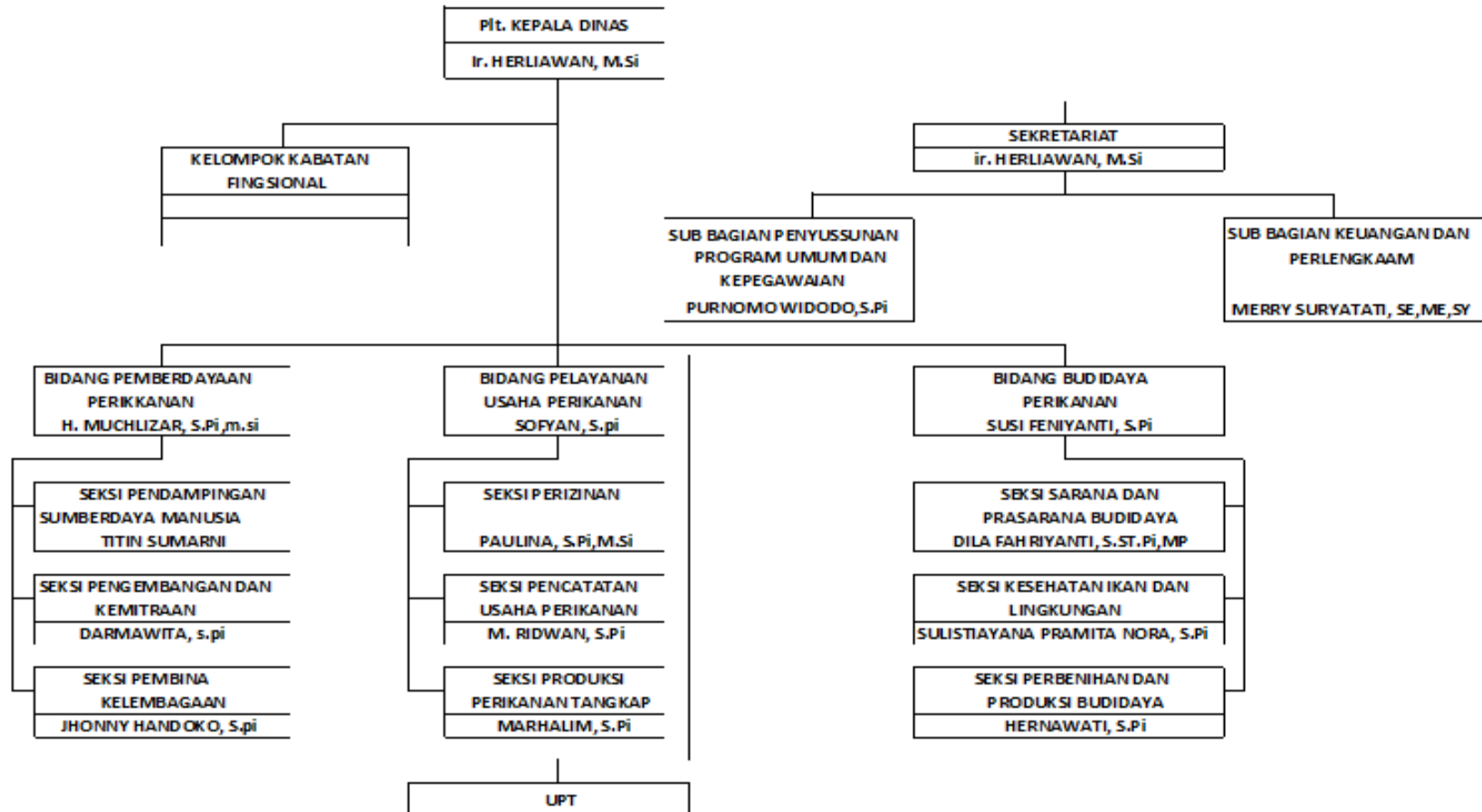
#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memperkuat struktur usaha kelautan, perikanan dan peternakan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi;
- c. Mendorong optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, perikanan dan peternakan menuju pembangunan yang berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kecerdasan dan kesehatan masyarakat melalui peningkatan konsumsi protein hewani;
- e. Menciptakan iklim usaha kelautan, perikanan dan peternakan yang kondusif;
- f. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat kelautan, perikanan dan peternakan melalui kelembagaan yang tangguh



### 3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis



#### 4. Uraian tugas Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bengkalis

##### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi perikanan daerah, memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program dibidang perikanan, pemberian kajian teknis perizinan dan/atau rekomendasi. Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-staf kantor.

##### b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program, umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perlengkapan dan tata usaha.

Untuk pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada sekretaris mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana, program, evaluasi dan pelaporan
2. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga.
3. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan penataan aset
4. Pelaksanaan urusan surat menyura, kearsipan dan dokumenasi dan hubungan masyarakat
5. Pelaksanaan urusan ukum, orgaisasi dan hubungan masyarakat.
6. Pelaksanaan pengkoordinasian peyelenggaraan tugas-tugas bidang, dan
7. Tugas-tugas lain yag di berikan oleh kepala.

Secretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari:

1. Sub bagian penyusunan program umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian. Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam data, penyusunan rencana program, anggaran dan monitoring serta kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan badan kehumasan.
2. Sub bagian keuangan dan perlengkapan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan administrasi keuangan.

c. Bidang pemberdayaan perikanan

Bidang pemberdayaan perikanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan perikanan.

Untuk pelaksanaan tugas pokok bidang pemberdayaan perikanan mempunyai fungsi :

1. perumusan rencana kebijakan di bidang pemberdayaan perikanan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perikanan dalam pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha dan kemitraan, dan pembinaan kelembagaan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, petunjuk teknis dan kriteria di bidang pemberdayaan perikanan meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha dan kemitraan, dan pembinaan kelembagaan;





4. pembia, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perikanan meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha dan kemitraan, dan pembiaian kelembagaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- Dalam melaksanakan tugas tersebut bidang pemberdayaan perikanan dibantu oleh :
1. seksi pengembangan sumberdaya manusia;
  2. seksi pengembangan usaha dan kemitraan; dan
  3. seksi pembinaan kelembagaan.
- d. Bidang pelayanan usaha perikanan
- Bidang pelayanan usaha bidang perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi di bidang elayanan usaha perikanan .
- Untuk pelaksanaan tugasn bidang pelayanan usaha perikanan mempunyai fungsi
1. penyusunan rencana dan program dibidang pelayanan usaha perikanan;
  2. penyusunan petunjuk teknik di bidang usaha perikanan;
  3. pelaksanaan survey dan pelaksanaan teknik program dibidang pelayanan usaha perikanan yang meliputi perizinan, pencatatan usaha perikanan dan roduksi perikanan tangkap;
  4. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporang di bidang perizinan, pencatatan usaha perikana dan produki perikanan tangkap; dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

oleh :

1. seksi pengembangan sumberdaya manusia;
2. seksi pengembangan usaha dan kemitraan; dan
3. seksi pembinaan kelembagaan.

d. Bidang pelayanan usaha perikanan

Bidang pelayanan usaha bidang perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi di bidang elayanan usaha perikanan .

Untuk pelaksanaan tugasn bidang pelayanan usaha perikanan mempunyai fungsi

1. penyusunan rencana dan program dibidang pelayanan usaha perikanan;
2. penyusunan petunjuk teknik di bidang usaha perikanan;
3. pelaksanaan survey dan pelaksanaan teknik program dibidang pelayanan usaha perikanan yang meliputi perizinan, pencatatan usaha perikanan dan roduksi perikanan tangkap;
4. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporang di bidang perizinan, pencatatan usaha perikana dan produki perikanan tangkap; dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di bidang pelayanan usaha perikanan di bantu oleh :

- 1. Seksi perizinan
- 2. Seksi pencatatan usaha
- 3. Seksi produksi perikanan tangka

e. budang budidaya perikanan

Bidang budidaya perikanan mempunyai tugas pelaksanaan pengkoordinasian dibidang budidaya perikanan yang meliputi serana prasarana budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembinaan dan produksi budidaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk pelaksanaan tugas bidang pelayanan usaha perikanan mempunyai fungsi yaitu :

1. penyusunan rencana dan program di bidang budidaya periknan;
2. penyusunan petunjuk teknik di budang budidaya perikanan;
3. pelaksanaan survey dan perenanaan teknik di bidang budidaya perikanan yang meliputi ; sarana dan prasarana budidaya, kesehattan ikan dan lingkungan, pembenihan dan produksi budidaya;
4. pembinaan, monitoring, evaliasi dan pelaporan dibidang budidaya perikanan meliputi :sarana dan prasarana budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, pembenihan dan produksi budidaya;
5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di bidang budidya perikanan di bantu oleh :

1. seksi sarana dan prasarana budidaya;
2. seksi kesehatan ikan dan lingkungan; dan
3. seksi pembenihan dan produksi budidaya.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pada Dinas Kelautan dan Perikanan dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) sesuai dengan kebutuhan. pembentukan Unit pelaksanaan Teknis dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50,51,52,53,54 dan 55 tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis, sampai saat ini (per Desember 2016) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis telah mempunyai 6 (Enam)

UPT yaitu :

1. UPT Unit Produksi Perikanan (UPP) Desa penebal;
2. UPT Balai Benih Ikan Patin (BBIP) Desa Papal;
3. UPT Pengelolaan Perairan Umum Daratan;
- UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pulau Rupat;
- UPT Pelayanan Pengembangan Budidaya Perairan Air Tawar yang berkedudukan di Kecamatan Mandau; dan
- UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Kel. Balai Raja



## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Hukum

C. T. Simorangkir, SH dan Woerjono Sastropranoto, SH dalam bukunya yang disusun bersama berjudul: “Pelajaran Hukum Indonesia” telah mendefinisikan hukum seperti berikut: “Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yang dengan hukuman tertentu”.<sup>26</sup>

Menurut SM. Amin, SH hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.<sup>27</sup>

Tujuan hukum ialah:<sup>28</sup>

1. Mengatur pergaulan hidup secara damai.
2. Memerintahkan apa yang patut, menyuruh apa yang baik, melarang apa yang tidak adil, membolehkan apa yang adil.
3. Mencegah perselisihan supaya jangan timbul kekacauan.

<sup>26</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet. Ke-8, h. 38

<sup>27</sup> Zeini Asyhadie, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed. 1, Cet. Ke-3, h. 20

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 122-123



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengusahakan keadilan, keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi agar seseorang dapat memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

5. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

6. Mencapai keadilan yang berunsurkan kepentingan daya guna dan kemanfaatan.

7. Mewujudkan segala sesuatu yang berfaedah.

8. Menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi setiap orang.

9. Menjaga kepentingan tiap orang agar tidak terganggu.

Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap yaitu:<sup>29</sup>

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan ketentraman masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberikan pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat.

Menunjukkan norma-normanya yang mengatur perintah-perintah dan larangan-larangan sedemikian rupa sehingga warga masyarakat diberi petunjuk untuk bertingkah laku.

2. Fungsi hukum Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. Bisa penjatuhan hukuman nyata dan takut berbuat yang merupakan kekangan. Daya mengikat dan bila perlu memaksa ini adalah watak hukum yang bisa menangani kasus-kasus nyata dan memberi keadilan, menghukum yang bersalah,

<sup>29</sup> Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Ed. 1, Cet. Ke-12, h. 154-156



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memutuskan agar yang hutang harus membayar dan sebagainya sedemikian rupa sehingga relatif dapat mewujudkan keadilan.

3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum juga dapat dimanfaatkan atau budidaya gunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk menggerakkan masyarakat kearah yang lebih maju. Dalam hal ini sering ada kritik atas fungsi hukum sebagai alat penggerak pembangunan yang dianggapnya melaksanakan pengawasan perilaku atau mendesaknya semata-mata hanya kepada masyarakat belaka sedangkan aparatur otoritas dengan dalih yang menggerakkan pembangunan lepas dari kontrol hukum.

4. Fungsi kritis dari hukum. Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan, pada aparatur pemerintah (petugas) dan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya.

### B. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bias diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 70



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang di laksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus di laksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>31</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>32</sup>

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut :

<sup>31</sup> Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan", Persadi, Ujung Pandang. Hlm 40

<sup>32</sup> <https://kbbi.web.id/pelaksanaan.html> diakses pada tanggal 14 Mei 2019



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
- b. *Resources* (sumberdaya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang di butuhkan dalam pelaksanaan;
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
- d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

Empat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan factor yang lain. Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:<sup>33</sup>

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;

<sup>33</sup> Abdullah Syukur, *op.cit.* H 398.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa pelaksana suatu program senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

### C Peraturan Menteri

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami kajian ini, maka suatu uraian singkat tentang pengertian peraturan menteri perlu disajikan lebih spesifik. Karena penyajian pengertian ini tidak jarang, terutama dalam kajian-kajian ilmu sosial, suatu istilah dapat dipahami tidak sama dan di pandang dari aspek yang berbeda. Perbedaan pemakaian pengertian atau konsep dalam memandang sesuatu tentu akan menghasilkan kesimpulan berbeda pula.

Menurut bahasa peraturan berasal dari kata atur, yang artinya tataan (kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.<sup>34</sup>

Kementerian adalah menteri yang diangkat oleh kepala Negara untuk kemudian kepadanya diserahkan suatu bidang jabatan yang dapat ia atur menurut kebijakannya sendiri dan ia dapat membuat keputusan-keputusan dengan ijtihadnya sendiri. Menteri adalah pembantu presiden.

Menteri menurut Undang-undang Dasar 1945 pasal 17, memimpin departemen pemerintahan. Jadi menteri membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi departemen. Meskipun UUD 1945 menyatakan menteri memimpin

<sup>34</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 76



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

departemen, kenyataannya selalu tidak begitu. Terdapat menteri yang tidak memimpin departemen. Dalam praktek istilah “Menteri Negara”, justru menunjukkan menteri yang tidak memimpin departemen. Untuk menteri yang memimpin departemen, cukup disebut menteri. Penamaan menteri negarapun mengalami perkembangan. Menteri tanpa portofolio artinya menteri yang tidak memimpin departemen dan tidak membidangi tugas pemerintahan tertentu. Menteri Negara semacam ini kita jumpai misalnya pada Kabinet Presidensiil pertama (1945).<sup>35</sup>

Pada saat ini, menteri negara meskipun tidak memimpin departemen tetapi menjalankan tugas pemerintahan di bidang tertentu seperti Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga. Selain itu terdapat pula Menteri Koordinator (seperti Menko EKUIN) dan Menteri Muda (seperti Menteri Muda Keuangan). Terdapat juga jabatan yang diberi nama Menteri seperti Menteri/Sekretaris Negara.<sup>36</sup>

Dewan menteri atau kabinet adalah suatu alat pemerintahan yang timbulnya berdasarkan konvensi ketatanegaraan. Menurut Ismail Suny kabinet adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang sesungguhnya, menteri-menteri itu tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai anggota kabinet dan dalam teori hukum (*legal theory*) mereka hanyalah “*servant of the crown*”, kepada siapa kekuasaan eksekutif dibebankan.<sup>37</sup>

Konteks sistem pemerintahan presidensiil, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden karena itu ia bertanggungjawab kepada presiden. Namun demikian, menteri-menteri Negara bukanlah pegawai tinggi

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hal. 90

<sup>36</sup> Ibid, hal. 90

<sup>37</sup> Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, hal. 48

biasa tetapi ia berkedudukan sebagai pemimpin departemen. Dalam hal ini, menteri mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara mengenai departemennya.<sup>38</sup>

Susunan organisasi departemen (KEPRES No. 45 Tahun 1974 yang diubah dengan KEPRES No. 45 Tahun 1984 terdiri dari Menteri sebagai pimpinan departemen, Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kantor Wilayah, dan satuan-satuan lain yang lebih rendah seperti Biro, Direktorat, Pusat dan Inspektorat). Susunan organisasi ini dikelompokkan menjadi beberapa unsur, yaitu: unsur Pimpinan (Menteri), unsur Pembantu Pimpinan (Sekretariat Jenderal), unsur Pelaksana (Direktorat Jenderal), dan unsur Pengawasan (Inspektorat Jenderal).<sup>39</sup>

a. Menteri mempunyai tugas, yaitu:

- 1) Memimpin Departemen.
- 2) Menentukan kebijaksanaan di bidang pemerintahan yang secara fungsional ada di bawahnya.
- 3) Membina dan melaksanakan kerjasama dengan Departemen, Instansi, dan organisasi lainnya.

b. Sekretariat Jenderal melakukan tugas pembinaan administrasi, organisasi, ketatalaksanaan, memberikan pelayanan teknis dan administratif dalam lingkungan departemennya. Sedangkan fungsinya adalah:

<sup>38</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, hal. 153

<sup>39</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, hal. 91

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Melakukan koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan seluruh administrasi departemen.
- 2) Melakukan perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah, dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan.
- 3) Melakukan pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, mengelola keuangan, dan peralatan/perlengkapan seluruh departemen.
- 4) Melakukan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan departemen.
- 5) Melakukan penelitian dan pengembangan dalam arti membina satuan penelitian dan pengembangan sepanjang belum dilakukan oleh satuan organisasi lainnya dalam departemen yang bersangkutan.
- 6) Melakukan pendidikan dan pelatihan dalam arti membina satuan pendidikan dan latihan sepanjang belum dilakukan oleh satuan lain dalam departemen yang bersangkutan.
- 7) Melakukan hubungan masyarakat.
- 8) Melakukan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dalam arti mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan.



9) Membina dan memelihara ketenangan dan ketertiban dalam lingkungan departemen.

c. Direktorat Jenderal dipimpin oleh Direktorat Jenderal, menyelenggarakan fungsinya, adalah:

- 1) Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, dan pemberian perizinan.
- 2) Pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok

d. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal, yang bertugas melakukan pengawasan dan menyelenggarakan fungsinya, adalah:

- 1) Pemeriksaan administrasi umum, administrasi keuangan, hasil-hasil fisik pelaksanaan pembangunan.

e. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal departemen atau direktorat Jenderal. Kantor Wilayah dipimpin Kepala Kantor Wilayah yang bertanggungjawab kepada Menteri atau Direktorat Jenderal.

Keputusan bersama menteri dalam ketatanegaraan adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi warga negara diadakan dan di pelihara oleh penguasa Negara.

#### D. Pengertian Perikanan

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Undang-undang republic Indonesia nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

### **E. Asas-asas Pengelolaan perikanan**

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

#### **1. Asas Manfaat**

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

#### **Asas Keadilan**

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

#### **3. Asas Kebersamaan**

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Asas Kemitraan

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

#### 5. Asas Kemandirian

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

#### 6. Asas Pemerataan

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

#### 7. Asas Keterpaduan

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

#### 8. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 9. Asas Efisiensi

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

#### 10. Asas Kelestarian

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.

#### 11. Asas Pembangunan Yang Berkelanjutan

Yang dimaksud dengan "asas pembangunan yang berkelanjutan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

#### F. Tambak

Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai, yang berisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan (akuakultur).

Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang.

Penyebutan "tambak" ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut.

Kolam yang berisi air tawar biasanya disebut kolam saja atau empang.

Tambak udang adalah sebuah kolam yang dibangun untuk membudidayakan udang, baik udang air tawar, air payau, maupun air asin. Udang merupakan salah satu jenis hewan penyaring sehingga kualitas air (keasaman dan

- kadar garam) sangat menentukan hasil yang didapatkan oleh petambak. Udang yang potensial untuk dibudidayakan dalam tambak adalah udang windu dan udang vaname. Keduanya mampu menoleransi kadar garam antara 0 hingga 45 persen. Penggunaan tambak dapat dilakukan secara bergiliran dengan hewan lain, seperti ikan bandeng sehingga tambak udang dapat berubah menjadi tambak ikan bandeng musim.
- Kegiatan pembesaran udang diawali dengan penentuan lokasi untuk mendukung kebutuhan biologis udang yang dipelihara. Untuk memenuhi daya dukung tersebut perlu dilakukan pemilihan lokasi yang tepat. Pemilihan lokasi dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan suatu lahan untuk konstruksi tambak dan operasional, mengidentifikasi kemungkinan dampak negatif dari pengembangan lokasi dan akibat sosial yang ditimbulkannya, memperkirakan kemudahan teknis dengan finansial yang layak, dan meminimalkan timbulnya risiko yang lain. Lokasi yang dipilih merupakan areal yang digunakan untuk pembesaran udang dan dikembangkan sebagai sentra pembesaran udang dalam bentuk kluster. Pemilihan lokasi pembesaran udang dimaksudkan untuk menjamin keselarasan lingkungan antara lokasi pembesaran udang dengan pembangunan wilayah dan keadaan sosial di lingkungan sekitarnya.
- Lokasi pembesaran tambak udang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>1</sup> Achmad Sudradjati Wedjatmiko, *Budi Daya Udang Di Sawah Dan Diambak*, (Penebar Swadaya, 2010), h.11

1. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
  2. untuk lokasi pembesaran udang dalam bentuk kluster, harus dilengkapi dengan *master plan* dan *Detail Engenering Design* (DED);
  3. memiliki air sumber, air pemeliharaan, dan tanah yang mencukupi dan berkualitas baik sesuai yang dipersyaratkan, sebagaimana tercantum pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3;
  4. tidak membangun tambak baru pada lahan mangrove dan zona inti kawasan konservasi;
  5. berada pada kawasan terhindar dari banjir rutin dan pengaruh pencemaran limbah bahan beracun dan berbahaya;
  6. berada di belakang sempadan pantai dan sempadan sungai;
  7. konstruksi infrastruktur harus mempertimbangkan fungsi konservasi dan meminimalisir gangguan terhadap lingkungan sekitar;
  8. tersedianya prasarana transportasi dan komunikasi yang memadai;
  9. dan
  9. tekstur tanah sesuai persyaratan teknis yang mendukung
  10. pertumbuhan pakan alami, kualitas air untuk media hidup udang, dan mampu menahan volume air tambak atau tidak bocor (<10 % per minggu).
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Pedoman Pembesaran Udang

Dalam pedoman pembesaran udang yang di maksud dengan pembesaran udang adalah kegiatan untuk memelihara dan/atau membesarkan udang serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestariannya, perlu ada perubahan orientasi dari eksploitasi sumber daya perikanan melalui penangkapan ikan menjadi peningkatan produksi perikanan budidaya. Perubahan orientasi tersebut penting karena potensi sumber daya perikanan tangkap memiliki keterbatasan dan memerlukan waktu untuk pemulihan kembali dalam keadaan semula. Dengan adanya peningkatan produksi perikanan budidaya, diharapkan kapasitas produksi perikanan secara nasional dapat meningkat dan eksploitasi sumber daya perikanan tangkap secara berlebih dapat dihindarkan.

Adanya perubahan orientasi dari eksploitasi perikanan tangkap menjadi peningkatan produksi perikanan budidaya membawa berbagai konsekuensi diantaranya kesiapan sarana dan prasarana pendukung produksi, teknologi pembudidayaan ikan, dan dukungan dari para pelaku usaha. Namun demikian, pendayagunaan lahan pembudidayaan ikan, termasuk di dalamnya untuk pembesaran udang windu (*Penaeus Monodon*) dan udang vaname (*Litopenaeus Vannamei*) juga tetap harus memperhatikan daya dukung yang ada.

Saat ini teknologi pembesaran udang windu dan udang vaname telah berkembang cukup pesat mulai dari teknologi sederhana, semi intensif, intensif, dan super intensif. Perkembangan dan penerapan teknologi yang inovatif dan adaptif diharapkan dapat membantu pelaku usaha terutama pembudidaya udang windu dan udang vaname untuk meningkatkan produksi, nilai tambah, dan menghasilkan udang windu dan udang vaname yang aman dikonsumsi. Penerapan teknologi dalam kegiatan pembesaran udang seyogyanya selaras dan mengacu

pada konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip daya dukung, usaha terintegrasi, pengelolaan, pengendalian, efisiensi, kualitas, percepatan (akselerasi), ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Tujuan pedoman umum pembesaran udang windu dan udang vaname ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan pembesaran udang windu dan udang vaname yang produktif, efisien, menguntungkan, dan berkelanjutan.

## H. Dasar Hukum Pelaksanaan Budidaya Tambak Udang

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan budidaya tambak udang di Kabupaten Bengkalis ialah:

1. Peraturan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 75/permen-kp/2016 tentang pedoman umum pemberasar udang windu (*penaeus monodom*) dan udang vaname (*litopenaeus vannamei*).
2. Undang-undang republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.
3. Peraturan daerah Kabupaten bengkalis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan.
4. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang pendejelasan kewenangan Bupati kepada Dinas Penanaman Modak dan pelayanan satu pintu Kabupaten Bengkalis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan

maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:75/Permen-KP/2016 Tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu Dan Udang Vaname di Kabupaten Bengkalis. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya jumlah pemilik tambak udang yang memiliki izin atas usaha tambak udang yang mereka kelola Serta tidak teralisasinya program pemerintah yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:75/Permen-KP/2016 Tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu Dan Udang Vaname di Kabupaten Bengkalis, sosialisasi terhadap peraturan menteri tentang pedoman umum pembesaran udang daerah Kabupaten Bengkalis, kesadaran pelaku usaha tambak udang dalam membangun tambak, pengawasan serta penerapan sanksi.

#### B. Saran

Kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkalis agar peraturan Menteri





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:75/Permen-KP/2016 Tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu Dan Udang Vaname berjalan secara efektif hendaknya Pemerintah Kabupaten Bengkalis lebih optimis dan tegas dalam menjalankan peraturan yang telah di tetapkan. Selain itu juga hendaknya dalam hal pengurusan izin syarat dan prosedurnya disederhanakan, memperketat pengawasan serta diterapkan sanksi yang tegas bagi yang melanggar setiap aturan yang telah di tetapkan.

Kepada pengusaha Tambak Udang disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran dalam pembangunan tambak baru dan jangan membangun tambak terlebih dahulu baru mengurus izin atas usaha tambak udang yang mereka kelola.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdullah Syukur. 1987. Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang
2. Agustini, Leo. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta
3. Aji, Zamuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
4. Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
5. Asikin, Amiruddin Zainal. 2009. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Pers
6. C. S. T. Kansil, dkk. 2005. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksar
7. Haryono Dodi 2012, *Ilmu Perundang-undangan*, Pekanbaru: UR Press
8. Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*,
9. Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*.
10. Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
11. Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,
12. Siswanto sunarno, M.H. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
13. Sukadji M. Fatuchri, *peningkatan/ teknologi budidaya perikanan*, Jurnal Iktiologi Indonesia Vol.2, No. 2, 2002: 61-66 ISSN 1693 – 0339
14. Samah, Abu, dkk. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desa Di Indonesia*.
15. Sarifuddin Azwar, 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta :Pustaka Belajar
16. Soewadi, Jusuf. 2012. *pengantar metodologi penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media
17. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BUKU

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

UIN Suska Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*,

Titik Triwulan Titik, dkk 2011, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Ed. 1, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana,

Usman Hermawan Atang 2014, “*Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*”, (Kaur Rapkum Bpkum Kepolisian Daerah Jawa Barat: Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 30 No. 1 Februari

Wahidin, Samsul. 2013 *Hukum Pemerintahan Daerah Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wedjatmiko Sudradijati Achmad, 2010. *Budi Daya Udang Di Sawah dan Tambak*, Penebar Swadaya.

Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Derah dan Derah Otonom*, Ed. 1, Cet. 2. Jakarta: PT. Grafindo Persada

## UNDANG-UNDANG

Undang-undang republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor:75/permen-kp/2016 tentang pedoman umum pemberasan udang windu (*penaeus monodon*) dan udang vaname (*litopenaeis vannamei*)

Peraturan daerah Kabupaten bengkalis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang pendegelasan kewenangan Bupati kepada Dinas Penanaman Modak dan pelayanan satu pintu Kabupaten Bengkalis

## DATA INERNET

<http://bnpers.com/2018/03/16/hutan-mangrove-di-bengkalis-terancam-punah-ditulap-menjadi-tambak-udang/>, di akses pada tanggal 16 maret 2018.

<https://hargabarangerbaru.top/harga-udang/>, di akses pada tanggal 1 April 2019

[https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-No.32 -Tahun-2009-mengenai-Perlindungan-](https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-No.32-Tahun-2009-mengenai-Perlindungan-)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup.aspx, di akses pada tanggal 13 September 2016

<https://monitorriau.com/news/detail/1054/asal-mula-dan-sejarah-munculnya-nama-kabupaten-bengkalis>. Di akses pada hari Sabtu, 03 September 2016 - 11:29:51 WIB

<http://herwandisahputra.blogspot.com/2014/10/sejarah-berdirinya-nama-kabupaten.html>. Jumat, 24 Oktober 2014

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/sejarah-bengkalis>. Di akses pada 10 Februari 2015

<https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Pages/Undang-Undang-No.32-Tahun-2009-mengenai-Perlindungan-dan-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup.aspx>, di akses pada tanggal 13 September 2016

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan.html> diakses pada tanggal 14 Mei 2019

## DOKUMENTASI

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



R



Isi



Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



R

Isi

Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







R



Isi



Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 75/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBESARAN UDANG WINDU DAN UDANG VANAME DI KABUPATEN BENGKALIS yang ditulis oleh:

Nama : FIRDAUS  
NIM : 11427103777  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 06 Januari 2020  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Sekretaris  
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji I  
Joni Alizon, SH., MH

Penguji II  
Dr. H. Abu Samah, MH

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**ERI SURIANTO, SH.I**  
NIP. 19750801 200701 1 023



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **FIRDAUS**

NIM : **11427103777**

Program Studi: **ILMU HUKUM**

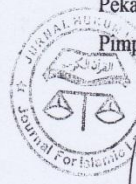
Judul : *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 75/Permen-Kp/2016 Tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu Dan Udang Vaname Di Kabupaten Bengkalis*

Pembimbing : **Syafrinaldi. SH., MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Januari 2020

Pimpinan Redaksi



**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**  
NIK. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web <http://fasih.uin-suska.ac.id>, E-mail : [fsihuinriau@gmail.com](mailto:fsihuinriau@gmail.com)

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3443/2019  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru.08 April 2019

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FIRDAUS  
NIM : 11427103777  
Jurusan : Ilmu Hukum SI  
Semester : X (Sepuluh)  
Lokasi : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BENGKALIS

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR:75/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN  
UMUM PEMBESARAN UDANG WINDU DAN UDANG VANAME DI KABUPATEN  
BENGKALIS

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PELAKSANAAN PERATURAN MENTRI KELAUTAN  
DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 75/PERMEN-KP/2016  
TENTENG PEDOMAN UMUM PEMBESARAN UDANG WINDU DAN UDANG  
VANAME DI KABUPATEN BENGKALIS, ditulis oleh saudara :

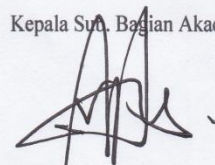
Nama : FIRDAUS  
NIM : 11427103777  
Program Studi : ILMU HUKUM

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : JUM'AT / 29 MARET 2019  
Narasumber : BASIR, MH

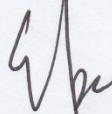
Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik



Asfendi s. Ag. M. Si  
NIP. 19610918 198803 1 002

Pekanbaru,  
Narasumber



Basir, MH  
NIP. 2015058202

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/21477  
TENTANG



182010

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor : **Un.04/F.I/PP.00.9/3443/2019 Tanggal 8 April 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

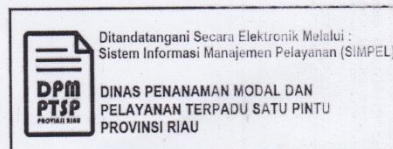
- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | FIRDAUS   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11427103777   |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75/PERMEN-KP/2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBESARAN UDANG WINDU DAN UDANG VANAME DI KABUPATEN BENGKALIS |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS  |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 10 April 2019



**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
  2. Bupati Bengkalis
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

Jl. Antara No. .... Bengkalis Kode Pos : 28751  
Telepon. 0766 - 23615, 0766 - 7018510 Fax. 0766 - 23615 E-mail : .....Website : www.bengkalis.go.id

Bengkalis, 16 April 2019

Nomor : 061/DPMPSP-JU/IV/2019/169  
Lampiran : -  
Hal : Rekomendasi

Kepada :  
Yth. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten Bengkalis  
di-  
Bengkalis

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis,  
memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/21447 tanggal 10 April 2019 tentang  
Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan  
ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **FIRDAUS**  
NIM : 11427103777  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : UIN SUSKA Riau  
Jenjang : S1  
Alamat : Pekanbaru

Bermaksud mengadakan riset / pra.riset dalam rangka penulisan skripsi :

1. Judul :  
"Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia  
Nomor 75/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu dan  
Udang Vaname di Kabupaten Bengkalis"
2. Lokasi Penelitian :  
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis
3. Penelitian ini berlangsung selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi  
ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara,  
mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan  
sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS

BASUKI RAKHMAD, AP, M. SI  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19750619 199503 1 003

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala DPMTSP Provinsi Riau;
2. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru;
4. Yang Berangkutan





## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

JL. PERTANIAN NO. 4 TELP/FAX. (0766) 2620260  
BENGKALIS

KODE POS : 28714

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 523 /DKP – SEKR/IX /2019/745

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis,  
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Firdaus  
NIM : 11427103777  
Jurusan : Ilmu Hukum  
alamat : Pekanbaru

Adalah benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan Riset dan pengumpulan data dengan judul **"Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 75/PERMEN-KP/tentang Pedoman Umum Pembesaraan Udang Windu dan Udang Vaname di Kabupaten Bengkalis "**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Bengkalis, 3 September 2019

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN BENGKALIS



**T. HERTAWAN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19650721 199203 1 008

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HUDUP PENULIS

Firdaus, lahir di Tameran, kabupaten Bengkalis provinsi riau pada tanggal 13 desember 1995 merupakan anak keenam dari 7 (tujuh) bersaudara, lahir dari ayah Ibrahim dan ibunda Nurjanah. Pada tahun 2001 mulai pendidikan jenjang Sekolah Dasar di SDN 033 Tameran, Kabupaten Bengkalis.



Lulus pada tahun 2008. setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan MTSNBengkalis selama 3 (tiga) tahun yaitu daritahun 2008 sampai tahun 2011. Tamat dari MTSN Bengkalis tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 2 Bengkalis selama 3 (tiga) tahun yaitu dari 2011 sampai tahun 2014 kemudia pada tahun 2014 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan strata-1 (S-1) Ilmu Hukum tepatnya di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Pengadilan Negeri Bengkalis. Atas berkar dan rahmat Allah Subhanahu Wata'aa serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **"Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor:75/permen-kp/2016 tentang Pedoman Umum Pemberasan Udang Windu dan Udang Vaname di Kabupaten Bengkalis."** Di bawah bimbingan langsung Bapak Syafrinaldi.SH.,MH. Berdasarkan halis ujian Sarjana Fakultas Syariah Dan hukum pada tanggal 06 januari 2020, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhan menyandang gelas Sarjana Hukum (SH).

Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah

1. Hak
  - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.